

Bawaslu Kabupaten Cirebon Perkuat Sinergi dengan Partai Politik dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Cirebon – Bawaslu Kabupaten Cirebon terus memperkuat Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan (PDPPB) sebagai langkah pencegahan agar tidak menjadi persoalan administrasi dimasa tahapan Pemilu mendatang. Pengawasan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu koordinasi langsung dengan partai politik serta pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikombinasikan dengan koordinasi bersama KPU Kabupaten Cirebon.

Pada tanggal 22 Juni-3 Juli 2026, Bawaslu Kabupaten Cirebon telah melakukan koordinasi kepada 14 dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, yakni Partai Gerindra, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat dan Partai Golkar.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data, dokumen, serta gambaran aktual mengenai kondisi organisasi partai politik. Selain itu, langkah ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan potensi permasalahan teknis maupun administratif yang dapat muncul pada tahapan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu mendatang.

Bawaslu Kabupaten Cirebon memandang bahwa pengawasan tidak dapat hanya bertumpu pada data yang tersedia di SIPOL. Oleh karena itu, koordinasi langsung dengan partai politik menjadi langkah strategis untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan faktual sehingga pengawasan tidak hanya didasarkan pada satu sumber data. Pendekatan tersebut memungkinkan Bawaslu melakukan verifikasi terhadap kondisi administrasi maupun kondisi riil partai politik di lapangan. Melalui koordinasi ini, ruang lingkup pengawasan juga menjadi lebih luas dan di sisi lain, kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Bawaslu dan partai politik sebagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawasan partisipatif.

Hasil koordinasi menunjukkan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama. Salah satunya, pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Cirebon pada umumnya belum mengetahui perkembangan pelaksanaan PDPPB melalui SIPOL karena kewenangan pengelolaan sistem tersebut berada pada pengurus tingkat pusat.

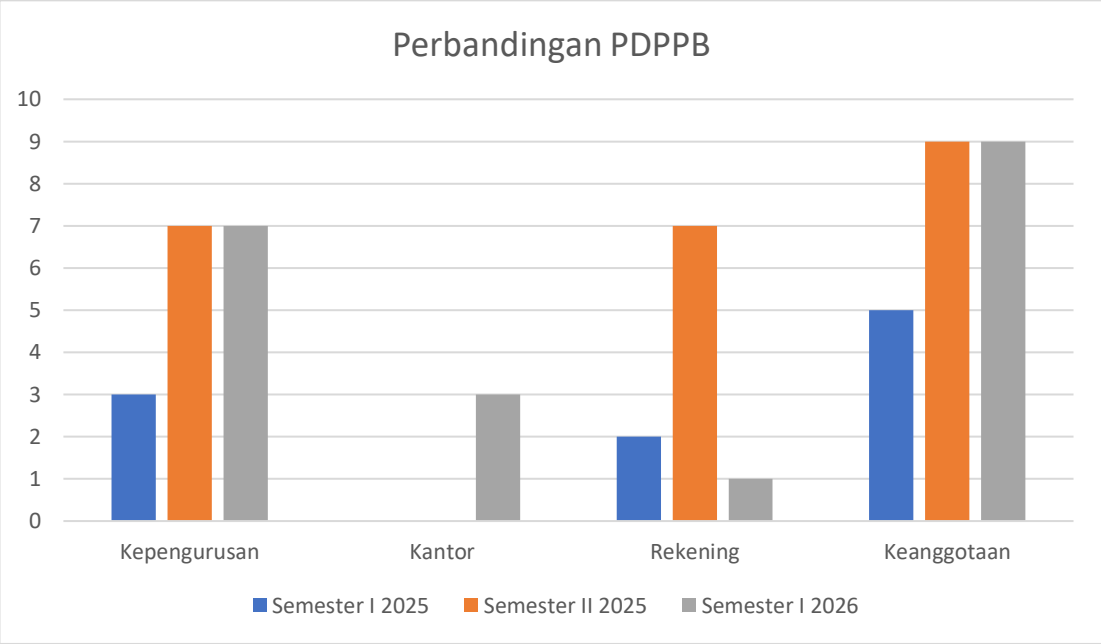
Bawaslu juga menemukan adanya beberapa partai politik yang telah berpindah domisili kantor, namun belum melengkapi dokumen administrasi pendukung. Bahkan, masih terdapat partai politik yang belum menetapkan kantor tetap setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelengkapan data administrasi pada tahapan pendaftaran peserta Pemilu mendatang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon mengidentifikasi potensi persoalan yang dapat berkembang menjadi isu substansial pada tahapan pendaftaran partai politik, yaitu potensi dualisme kepengurusan. Meskipun belum sepenuhnya terbukti secara administratif, dinamika pergantian kepengurusan diperkirakan akan terus berlangsung menjelang Pemilu 2029 sesuai kebutuhan internal masing-masing partai politik.

Aspek keanggotaan partai politik juga menjadi perhatian dalam pengawasan. Pasca Pemilu 2024, perubahan status keanggotaan diperkirakan berlangsung cukup dinamis, baik karena adanya anggota yang bergabung, meninggal dunia, pindah domisili, maupun yang mengundurkan diri. Oleh sebab itu, pembaruan data

keanggotaan secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga validitas data partai politik.

Berikut hasil perbandingan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan pada semester I 2025, semester II 2025 dan semester I 2026 :



Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan PDPPB pada Semester I Tahun 2025, Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026, secara umum terlihat adanya tren peningkatan pemutakhiran data partai politik pada sejumlah variabel, antara lain kepengurusan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran partai politik dalam melakukan pembaruan data secara berkelanjutan.

Bawaslu Kabupaten Cirebon berharap seluruh partai politik dapat terus melakukan pemutakhiran data secara berkala pada setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku. Data partai politik yang akurat, mutakhir, dan valid tidak hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, serta meminimalisir potensi sengketa pada tahapan Pemilu mendatang.

Melalui pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pengawasan yang preventif, kolaboratif, dan berbasis data aktual melalui sinergi bersama KPU, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan kepemiluan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Cirebon.